

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persaingan dalam dunia bisnis semakin ketat, diperlukan modal yang kuat untuk membangun dan mengembangkan perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Apabila perusahaan ingin berkembang, maka perusahaan tersebut membutuhkan modal dalam bentuk utang dan ekuitas untuk mengembangkan suatu perusahaan (Brigham dan Houston, 2011:153)

Perusahaan juga perlu memperhatikan penggunaan modal yang dikeluarkan dan memerlukan sistem untuk mengelola perusahaan dalam penggunaan modal tersebut, karena setiap pengeluaran yang digunakan perusahaan memiliki tingkat resiko yang berbeda bagi perusahaan dan dapat berdampak bagi perusahaan itu sendiri (Amiriyah dan Andayani, 2014)

Penggunaan hutang yang terlalu sering dalam penanaman modal perusahaan dapat memberikan resiko bagi perusahaan itu sendiri, seperti perusahaan tidak bisa memaksimalkan kinerja yang ada didalam perusahaan, dan perusahaan tidak dapat memaksimalkan nilai-nilai yang ada didalam perusahaan (Binangkit dan Raharjo, 2014).

Pengelolaan perusahaan yang baik memerlukan sistem atau mekanisme yang dapat mengatur sebuah perusahaan, Syakhroza dan Sulistyanto (2003) menyebutkan bahwa, *Good Corporate Governance* sendiri dapat diartikan sebagai suatu sistem atau mekanisme yang melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif dan dapat menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu, kemunculan GCG sudah ada di dalam beberapa dunia.

Kemunculan *Good Corporate Governance* sendiri sudah terasa di beberapa negara dan sudah merata karena adanya tata aturan hukum dan

norma-norma yang kuat sehingga meminimalisir kecurangan-kecurangan di dalam perusahaan, di Amerika sendiri GCG muncul dikarenakan banyak skandal kecurangan yang terdapat di perusahaan besar, seperti *Poly Peck*, *Maxwell*, dan *Wordcom* (Thomas S.Kaihatsu,2006).

Begitupula perusahaan yang ada di kawasan Asia sendiri, pelaksanaan GCG baru terlaksana pada tahun 1990, dimana pada tahun tersebut krisis ekonomi melanda Asia, Johnson (1996) menyebutkan bahwa, penyebab krisis ekonomi di beberapa negara Asia adalah karena lemahnya praktek-praktek *good corporate governance* pada wilayah tersebut.

Penjelasan diatas didukung dalam *Asian Development Bank (ADB)* yang mengungkapkan bahwa krisis keuangan yang melanda berbagai negara di Asia, antara lain disebabkan oleh buruknya atau kurangnya pelaksanaan GCG di beberapa negara Asia (ADB, (2000)

Pelaksanaan GCG di Asia Tenggara kurang terlaksana dengan baik, Iskandar Chamlou (2000) menyebutkan bahwa, krisis ekonomi adalah penyebab kurang nya pelaksanaan GCG secara maksimal di beberapa negara Asia termasuk juga negara Indonesia.

Pelaksanaan GCG di Indonesia terbilang belum terlaksana secara maksimal, terbukti dalam Wibowo (2010), survei yang dilakukan oleh *Credit Lyonnais Securities (CLSA)* terhadap standar-standar GCG yang dilakukan oleh 495 perusahaan di 25 negara berkembang selama bulan Februari sampai dengan bulan April pada tahun 2001, menunjukan bahwa Indonesia menduduki peringkat paling bawah dengan skor 37,81 dari skala 0,00-100,00 (100,00 adalah nilai tertinggi). Skor tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan skor total untuk perusahaan di negara lainnya, seperti Singapura (64,50), Malaysia (56,60), India (55,60), Thailand(55,10), Taiwan (54,60), Cina (49,10), Korea (47,10), dan Filipina (43,90).

Pernyataan diatas didukung juga survei yang dilakukan pada tahun 2003, survei yang dilakukan oleh CLSA dan *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang dilakukan terhadap 380 perusahaan di 10 negara Asia menunjukkan rata-rata skor yang dimiliki oleh Indonesia adalah 43,00 dari skala (00,00 – 100,00). Skor tersebut tampak lebih tinggi dari tahun sebelumnya, akan tetapi Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya seperti, India dengan skor (64,80), Thailand dengan skor (60,20), Taiwan dengan skor (58,70). Pada tahun 2014, dari *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menunjukkan nilai 39 (00,00 – 100,00) dan Indonesia masih menunduki peringkat paling bawah Allen (2014).

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang memaksimalkan pelaksanaan GCG dan lambat untuk memperbaiki sehingga berdampak tidak baik bagi perusahaan dan menyebabkan krisis ekonomi ADB (2000).

Tabel 1.1
Pelaksanaan GCG dibeberapa negara Asia

Nama Negara	Total %	Rules and Practices	Enforcement	Political and Regulator	Accounting and Auditioning	CG Culture
Singapore	67	63	63	67	87	55
Hongkong	65	63	69	69	70	53
Japan	63	51	63	69	75	58
Taiwan	60	54	54	64	77	50
Thailand	58	64	51	45	77	50
Malaysia	56	54	54	48	82	42

Nama Negara	Total %	Rules and Practices	Enforcement	Political and Regulator	Accounting and Auditioning	CG Culture
Korea	55	59	51	56	58	49
India	52	48	50	53	70	41
China	43	38	40	36	67	34
Philippines	38	35	19	41	65	33
Indonesia	36	35	21	33	58	32

Sumber: Asian Corporate Governance Association/ACGA (2016)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat posisi negara Indonesia berada di urutan paling bawah diantara 11 negara Asia lainnya dalam pelaksanaan GCG di tahun 2015. Presentase yang diperoleh Indonesia sendiri adalah 36%, dimana presentase tersebut masih terbilang kurang dalam memaksimalkan GCG, dan presentase tersebut sangat minim dan jauh dari standart international yang harus berada di angka 80%.

Pelaksanaan GCG yang kurang maksimal dapat memberikan dampak atau pengaruh yang tidak baik bagi perusahaan, seperti yang ada di dalam Hamdani (2016) menyatakan bahwa, apabila pelaksanaan GCG yang ada di dalam perusahaan kurang maksimal ataupun tidak dilaksanakan, maka akan memberikan pengaruh atau dampak yang buruk bagi perusahaan itu sendiri, seperti kurang memaksimalkan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan, kurang memaksimalkan kinerja karyawan yang ada didalam perusahaan terkait pelaksanaan pekerjaan, kurang mengoptimalkan kinerja keuangan yang ada didalam perusahaan.

Terdapat beberapa penelitian yang mendukung pernyataan diatas, dimana penelitian tersebut dilakukan oleh Trinanda dan Didin Mukodim

(2010) pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG yang kurang maksimal akan mengakibatkan kinerja keuangan yang tidak baik, dan dapat mempengaruhi keadaan jangka panjang dari perusahaan itu sendiri seperti kurangnya hasil yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan.

Hasil dari penelitian lain yang meneliti perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga dilakukan oleh Sami, H. (2011), yaitu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang kurang maksimal akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan memberikan dampak negatif pada perusahaan itu sendiri, seperti kurangnya kepercayaan investo terhadap perusahaan, dan kurangnya kepercayaan perusahaan lain dalam menjalin kerjasama.

Perusahaan di Indonesia juga belum melaksanakan GCG secara maksimal, bisa dilihat dalam Hamdani, S.E. (2016) menyatakan bahwa perusahaan di Indonesia yang melaksanakan GCG masih sangat kurang, dikarenakan kurangnya komitmen yang kuat dalam melakukannya. Dalam Wulandari (2014), menyatakan bahwa pelaksanaan GCG di Indonesia menunjukkan hasil yang belum memuaskan dan upaya perbaikan GCG belum dilakukan secara baik dan benar.

Pernyataan tersebut terbukti dalam penelitian Marlin C.R. dan Ratih I. (2014), dalam penelitiannya juga menjelaskan penerapan GCG yang kurang optimal di suatu perusahaan yang bergerak dibidang distribusi *sanitary*. Perusahaan ini telah menerapkan GCG akan tetapi penerapan nya kurang optimal, bisa diliat dari hasil penelitian aspek *responsibility* di dalam perusahaan yang kurang perhatian terhadap lingkungan di sekitar sehingga menyebabkan lingkungan sekitar perusahaan menjadi tercemar akibat limbah yang dihasilkan oleh perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ardy (2016) di perusahaan PT. Cahaya Mutiara Farma yang bergerak sebagai distributor obat telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Akan tetapi, terdapat aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal, seperti aspek *Transparency* dimana komunikasi antar karyawan kurang berjalan dengan baik dan sering terjadi pertengkaran.

Penelitian lain yang mendukung pernyataan diatas adalah penelitian yang dilakukan oleh Leonardhy B. dan Widjojo S. (2016) yang meneliti pelaksanaan GCG di perusahaan PT. Berkas Cakra yang bergerak dalam distribusi makanan dan minuman kesehatan. Perusahaan sudah melaksanakan aspek-aspek GCG. Akan tetapi, terdapat aspek yang belum dilaksanakan secara maksimal, seperti aspek *transparency* yang ada di dalam perusahaan, perusahaan menentukan batasan-batasan keterbukaan kepada pihak internal dan eksternal sehingga menyebabkan kurang terbuka nya informasi antar karyawan dan kurang mendapat kepercayaan dari perusahaan lain.

Pentingnya melaksanakan GCG di dalam perusahaan distribusi dapat memberikan dampak yang baik bagi perusahaan itu sendiri, dalam Jojok, D. (2009) menyatakan bahwa terdapat dampak-dampak yang dapat dirasakan perusahaan apabila melaksanakan GCG secara maksimal, seperti pengambilan keputusan akan berlangsung secara optimal dan tidak bersifat subjektif, dapat menciptakan budaya kerja yang lebih sehat, menghindari atau meminimalisir tindakan penyalahgunaan kekuasaan, dan tingkat kepercayaan stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga nama baik perusahaan akan menjadi lebih positif dan kinerja perusahaan lebih maksimal.

Pelaksanaan GCG dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, dalam penelitian Mitton, (2002) yang mengambil sampel

sebanyak 398 perusahaan di Indonesia, menyebutkan bahwa GCG dapat melindungi orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan sehingga menghasilkan suatu kinerja yang lebih positif bagi perusahaan.

Pelaksanaan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan, perusahaan yang melakukan peningkatan kualitas pada pelaksanaan GCG maka perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan atau kurang memaksimalkan pelaksanaan GCG cenderung akan menunjukkan peningkatan penilaian pasar (Cheung, 2011). Maka dari itu, pelaksanaan GCG sangatlah penting bagi perusahaan.

Pelaksanaan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan, perusahaan yang melakukan peningkatan kualitas pada pelaksanaan GCG maka perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan penilaian pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan atau kurang memaksimalkan pelaksanaan GCG cenderung akan menunjukkan peningkatan penilaian pasar (Cheung, 2011). Maka dari itu, usaha peningkatan pelaksanaan GCG pada perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan.

Good Corporate Governance sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, karena GCG merupakan kunci keberhasilan bagi setiap perusahaan agar dapat bertumbuh dengan baik sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dalam jangka panjang Sani A.S. dan Rahayu S. (2018)

Seiring berjalan nya waktu, perusahaan “X” adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi pemasok teknis (*stockist*). Perusahaan “X” sendiri sudah berdiri sejak 14 tahun yang lalu sejak tahun 2014. Perusahaan “X” menjadi salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan beberapa aspek-aspek GCG di dalam lingkungan perusahaan baik itu aspek *Accountability*,

Responsibility, Independency, dan, Fairness. Maka dari itu, peneliti memilih perusahaan “X” yang bergerak dibidang distribusi dan perusahaan “X” juga sudah melakukan aspek-aspek GCG di dalam lingkungan pekerjaan. Peneliti juga melakukan wawancara kepada informan yang berkedudukan sebagai direktur di perusahaan “X”:

“Dari segi keterbukaan atau komunikasi antar karyawan dengan atasan cukup berjalan dengan baik mas, bukan baik loh mas, cukup baik, dikarenakan masih ada miss komunikasi yang sering terjadi di dalam perusahaan mas, seperti, intruksi dari atasan ke karyawan itu hanya beberapa saja yang tahu bukan kesemua karyawan sampek-sampek ada salah paham atasan dengan karyawan mas, untuk pembagian tugasnya sudah diberikan sesuai dengan SOP yang ada, dan di dalam perusahaan ini juga memberikan kebebasan terhadap karyawan dalam bekerja mas, tapi ya gitu tetap sesuai dengan SOP yang telah dibentuk mas, untuk tugas yang diberikan perusahaan kepada karyawan, rata-rata dikerjakan tepat waktu mas dan jarang ada tugas yang belum dikerjakan mas, perusahaan tidak milih-milih mas kalau nerima karyawan, seperti ras nya apa, agama nya apa, itu perusahaan gak peduli mas, yang penting dia bisa memberi kontribusi yang baik, perusahaan akan nerima dia mas seperti itu mas.”

(BS, direktur perusahaan “X”, 25 tahun)

Perusahaan distribusi yang telah melaksanakan GCG tentunya menjadi perusahaan yang sehat dalam setiap kegiatan perusahaan tersebut, dalam Wati, L. (2012) menyebutkan bahwa, Seharusnya perusahaan distribusi yang melaksanakan GCG menghasilkan kinerja karyawan yang baik, keuangan yang lebih maksimal, dan pencapaian perusahaan yang lebih maksimal. Akan tetapi, senyatanya di dalam perusahaan “X” sudah melaksanakan aspek-apsek GCG yaitu, *Akuntabilitas* dimana perusahaan sudah memberikan *job desk* kepada karyawan yang bekerja di perusahaan, *Responsibility* dimana karyawan yang ada di dalam perusahaan mampu

mempertanggung jawabkan kinerja mereka di dalam perusahaan, *Independency* dimana perusahaan memberikan kebebasan bekerja dan mengemukakan pendapat saat bekerja, dan *Fairness* dimana perusahaan memandang karyawan yang bekerja semua sama tanpa memandang SARA. Akan tetapi, kendala yang dialami perusahaan “X” dalam melaksanakan aspek *Transparency* adalah masih terdapat kesalahpahaman sehingga membuat keterbukaan atau penyampaian informasi di dalam perusahaan kurang berjalan dengan baik sehingga informasi yang diberikan kurang dapat diterima oleh setiap orang yang bekerja di dalam perusahaan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan dari hasil prelinmari yang didapat, peneliti tertarik untuk meneliti melaksanakan GCG pada perusahaan “X” di Surabaya. Peneliti ingin melihat pelaksanaan GCG yang dilakukan oleh perusahaan ‘X’ sesuai dengan hasil preliminar yang telah didapat oleh peneliti. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian lainnya adalah di dalam penelitian ini menjelaskan pelaksanaan GCG yang dilakukan secara maksimal. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan karena pelaksanaan GCG yang dilakukan secara maksimal dapat membuat perusahaan yang sehat dan mengurangi kecurangan-kecurangan yang ada didalam perusahaan. Selain itu, tujuan penelitian ini dilakukan untuk melihat gambaran pelaksanaan GCG pada perusahaan “X” di Surabaya

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran pelaksanaan *good corporate governance* pada perusahaan “X” di Surabaya ?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengetahui gambaran pelaksanaan aspek-aspek *good corporate governance* pada perusahaan “X” di Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu psikologi industri organisasi seputar pengaplikasiannya dalam konteks *good corporate governance* pada perusahaan “X”

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi karyawan di perusahaan “X”

Memberikan gambaran tentang apa saja aspek-aspek *good corporate governance* yang ada di perusahaan “X”, sehingga dapat menjadikan masukan bagi karyawan di dalam perusahaan “X” untuk mengembangkan diri dalam melaksanakan aspek-aspek *good corporate governance*.

b. Bagi perusahaan “X”

Dapat memberikan gambaran terkait *good corporate governance* yang ada di dalam perusahaan “X” sehingga dapat menjadi masukan untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan kinerja perusahaan.